Eksis

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(2), November 2021, 220-223
Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2580-6882 (Online), ISSN 2087-5304 (Print), DOI 10.33087/eksis.v12i2.270

Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten)

Mohamad Husni[1], Riyanthi Idayu[2]
[1,2] Universitas Bina Bangsa
Correspondence email: mohamadhusni06@gmail.com

Abstrak. Penyelenggaraan dan pengawasan keuangan daerah merupakan bagian yang terpenting dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan di kota dan kabupaten Banten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Banten. Sampel sebanyak 34 orang yang terdiri dari anggota BPK Perwakilan Banten dengan Teknik sampling Purposive Sampling. Teknik analisis data menggunakan pengujian regresi berganda dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten, (2) Pengawasan pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten, (3) Pemeriksaan keuangan daerah dan Pengawasan pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kata kunci: mekanisme pengawasan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, temuan pemeriksaan, tindak lanjut rekomendasi, pengawasan oleh legislatif, pengawasan publik.

Abstract. *The implementation and supervision of regional finances is the most important part in improving the performance of local government administration. This study aims to determine the effect of regional financial inspection and supervision on the performance of local government administration in the city and district of Banten. The population in this study were all local governments in Banten. A sample of 34 people consisting of members of the Banten Representative BPK with purposive sampling technique. The data analysis technique used multiple regression testing and hypothesis testing. The results of this study indicate that (1) Regional Financial Audit has a significant effect on the performance of the Banten Provincial Government, (2) Financial management supervision has a significant effect on the performance of the Banten Provincial Government, (3) Regional financial audit and financial management supervision has a significant effect on Government performance. Area.*

Keywords: *supervisory mechanisms, the performance of local governance, inspection findings, follow-up recommendations, Supervision by the legislature, public Supervision*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih. Sesuai dengan UU mengenai otonomi daerah bahwa bermakna tidak hanya melimpahkan kewenangan pembangunan kepada daerahnya tetapi lebih penting dari itu bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan yang baik sehingga dapat menjadi pelayan publik yang baik untuk seluruh rakyatnya.

Menurut Mardiasmo (2002) aspek penting dalam mendukung keberhasilan otonomi di suatu daerah adalah pengawasan, pengendalian sampai dengan inpeksi. Meskipun saling berhubungan antara ketiganya tetapi memiliki makna dan aplikatif yang berbeda di lapangan. Pengawasan merupakan kewenangan yang dilakukan oleh DPRD kepada pemerintah daerah dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah mutlak untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pengendalian adalah aspek yang kedua yang merupakan dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan sehingga masyarakat bisa langsung merasakan dampaknya terhadap kebijakan yang dibuat. Sedangkan aspek yang ketiga adalah pemeriksaan (audit) dilakukan oleh pihak-pihak yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya sehingga mampu mengaudit pengelolaan dana pemerintah yang akuntabel dan transparan serta dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemerintah dalam hal ini eksekutif atas temuan yang harus segera dilakukan perbaikan.

Badan yang di tunjuk oleh pemerintah untuk melakukan audit atau pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK merupakan badan resmi dari pemerintah sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 adalah satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan audit pengelolaan keuangan negara. BPK dapat melakukan pengawasan terdapat pengelolaan keuangan negara dan bertindak sebagai auditor untuk memeriksa laporan keuangan atas pengelolaan dan pembelanjaan keuangan yang dipakai.

UU No 32 tahun 2004 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah meliputi rakyat, bupati, walikota sampai dengan DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan mitra dari pemerintahan yang memiliki fungsi legislasi atau pembuatan peraturan perundangan, fungsi anggaran yaitu dapat menyusun anggaran sampai dengan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat dianggap setara dengan tata kelola dewan berdasarkan konsep instansi. Selain itu, ada juga pengawasan masyarakat (Waskat) sebagai *kontrol sosial.* Masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah. Masyarakat dapat melaksanakan pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat sebagai individu, kelompok atau organisasi.

Kinerja daerah pada dasarnya merupakan kemampuan daerah untuk dapat mengelola urusan daereahnya. Pemerintah daerah tidak hanya satu-satunya pelaksanaan otonomi daerah tetapi jauh dari itu harus melibatkan swasta dan masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu paradigma pembangunan adalah melakukan koneksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai suatu sistem yang saling menguatkan (LAN, 2007).

Kinerja daerah yang sukses tidak bisa dipandang sebagai kesuksesan dari pemerintah itu sendiri tetapi merupakan satu kesatuan antara swasta dan masyarakat yang mendukung program pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas pemerintah darah yang dihubungkan dengan kinerja daerah, dilihat dari hasil pemeriksaan oleh BPK, seperti kelemahan dalam sistem pengendalian internal; ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tindak lanjut rekomendasi temuan audit, serta dari DPRD dan masyarakat digunakan sebagai pengawasan untuk mengetahui apakah otonomi daerah telah menghasilkan prestasi dengan diharapkan atau kontraproduktif dengan apa yang telah direncanakan.

Pendapat BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten periode 2016-2018 menunjukkan bahwa persentase LKPD yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 1 Laporan BPK untuk Entitas 3 Tahun Terakhir

Tidak.	Entitas	2016	2017	2018
1	Kabupaten Lebak	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Pandeglang	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Serang	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Tangerang	WTP	WTP	WTP
5	Kota Cilegon	WTP	WTP	WTP
6	Kota Serang	WDP	WTP	WTP
7	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP
8	Kota Tangerang Selatan	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel tersebut meskipun pemerintah provinsi Banten memperoleh opini WTP tetapi bukan berarti tidak memerlukan perbaikan. WTP merupakan apresiasi dari pemerintah terhadap penilaian yang dilakukan terhadap pemerintah daerah dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Artinya bahwa pengelolaan keuangan daerah di provinsi Banten sudah dilakukan profesional karena mendapat predikat tersebut.

Perbaikan terutama dalam pengelolaan Pendapat Asli Daerah (PAD), yang kurang menguntungkan pemerintah daerah (Pemda) Kelemahan tersebut termasuk pengelolaan PAD sehingga kurang dapat menguntungkan pemerintah daerah. Kemudian pada aspek pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan kepatuhan karena tentu akan diperiksa oleh BPK.

PAD perlu dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembangunan daerahnya sendiri. PAD yang tinggi memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan memeriksa hasil laporan laporan keuangan daerah tahun 2016, 2017, 2018 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (DPRD Provinsi Banten). Desain dalam penelitian ini adalah desain kausalitas. Desain kausalitas sangat membantu dalam menganalisis hubungan antara satu variabel dan variabel lain atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain, sifat hubungan antara variabel-variabel ini simetris-asimetris (Umar, 2007: 35). Jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten pada tahun 2019 dan Dewan Pengawas Republik Indonesia Perwakilan Banten. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian di I adalah anggota BPK Banten, Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Metode teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan berbagai kriteria. Sampel dari 34 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	D	F
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	4,417	1,453		3,039	,005		
X_1	,285	,111	,320	2,572	,015	,281	
X_2	,187	,085	,249	2,212	,035	,210	
Adjust R Square F-							,880
Hitung							73,578
Sig. F							,000[b]

Berdasarkan analisis data yang terdapat pada tabel tersebut maka persamaan regresi berganda yang didapat X1 merupakan pemeriksaan keuangan daerah dan X2 merupakan pengawasan pengelolaan keuangan.

Y = 4.417 + 0,285 (X1) + 0,187 (X2)

Pertama, dari persamaan regresi linier ganda yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel Pemeriksaan Keuangan Daerah adalah 0,285 dan bertanda positif artinya bahwa setiap kenaikan satu satu satuan pemeriksanaan keuangan daerah maka kinerja daerah juga meningkat sebesar 0,285. Mengacu pada hasil tabel di atas, diketahui bahwa nilai t-calculated > t-table (2.572 > 1.694) Ini berarti Ho ditolak sehingga kesimpulannya "pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah".

Kedua, masih dari persamaan regresi linier ganda di atas dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel Pengawasan Keuangan Daerah adalah 0,187 dengan tanda positif artinya setiap terjadi kenaikan satu satuan maka kinerja pemerintah naik sebesar 0,187 Dalam hasil tabel di atas, diketahui bahwa nilai t-count > t-table (2.212 > 1.694) Artinya HA dapat diterima dan Ho ditolak sehingga "Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah memiliki efek signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah"

Ketiga, nilai konstan untuk Kinerja Pemerintah Daerah adalah 4.417, ini berarti bahwa jika Pemeriksaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah konstan atau tetap maka Kinerja pemerintah daerah adalah 4.417. Namun, jika nilai keseluruhan koefisien variabel bebas meningkat satu, maka akan menyebabkan kinerja pemerintah meningkat sebesar 5.592 dengan nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R square yaitu 88,0%.

Selanjutnya, hasil penguji hipotesis menggunakan F-Test dapat disimpulkan bahwa F menghitung tabel > F (73.578 > 3.305) dengan α = 0,000 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara statistik pada tingkat kepercayaan 5%, maka hipotesis tersebut diterima, yaitu "Pemeriksaan, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki efek signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah".

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan hawa terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksaan dan pengawasan akan membuat tata kelola pengelolaan keuangan daerah menjadi baik sehingga akan mampu melakukan alokasi yang tepat terhadap keuangan daerah sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak ini menjadi penting karena masyarakat menjadi respon yang tepat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan.

Selain itu, fungsi yang dilakukan inspektorat tidak serta merta hanya melakukan Pengawasan (Supervisi). Namun, juga kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya.

Beberapa hal yang menjadi temuan perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bentuk refleksi dalam melakukan perbaikan terutama mengenai PAD yang perlu diefektifkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat menjadi puas terhadap kinerja pemerintah daerahnya.

Temuan di lapangan diketahui bahwa diperlukan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten yang signifikan tentunya harus dikelola secara efektif untuk kepentingan masyarakat broader sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengawasan yanglebih ketat dari inspektorat agar tidak terjadi pemborosan dan kebocoran anggaran serta perlunya akuntabilitas dan transparansi publik sehingga kinerja pemerintah daerah di lingkungan pemerintah daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini bisa bertambah. Berdasarkan hasil analisis di atas, Pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat meningkat. .

DAFTAR PUSTAKA

Boynton, C William, Raymond N. Johnson, Walter G. Kell (2007). Audit Modern, Jakarta:Erlangga.

https://banten.antaranews.com/berita/32165/bpk-banten-masih-ada-kelemahan-kelola-keuangan di tanggla 21 Maret 2012

Husein Umar. 2009. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Persada

Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Teori perusahaan: Perilaku manajerial, biaya agensi dan struktur kepemilikan", Journal of Finance Economic 3:305-360, di-download dari http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf.

Lembaga Administrasi Negara. 2004. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Buku 3. Jakarta , LAN.

Mardiasmo,2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri no 73 Tahun 2009 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

UU no 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

Wawan, Lia 2009, pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi FE Unsil Vol 4 no 1